

<http://jurnal.utu.ac.id/ekombis/>**Jurnal Ekonomi dan Bisnis**

| ISSN (Print) 2355-0627 | ISSN (Online) 2355-097X |



STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDA ACEH

*Jhon Wahidi¹, Juaris²*¹ Prodi Ilmu Administrasi Negara STISIP Al Washliyah Banda Aceh, Email: jwnagaya79@gmail.com² Prodi Ilmu Administrasi Negara STISIP Al Washliyah Banda Aceh, Email: juaris.aceh@gmail.com

ARTICLE INFORMATION

Received:
Revised:
Accepted: March 00, 00
Available online:

KEYWORDS : Empowerment Strategy, Small and Medium Enterprises, Community Economy and Covid-19 Pandemic

CORRESPONDENCE

Phone:
E-mail:

ABSTRACT

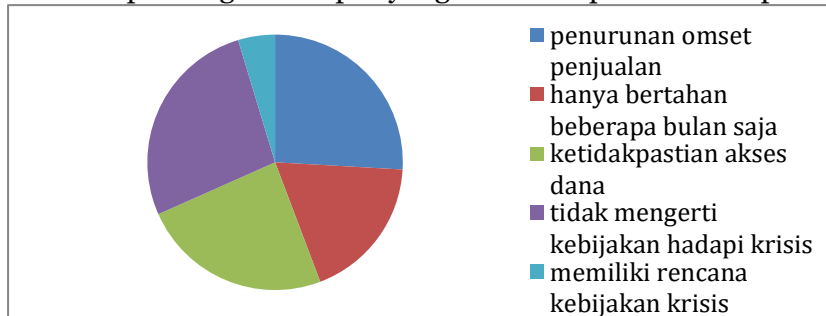
Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the most impactful businesses due to the Covid-19 pandemic. The city of Banda Aceh, which is the capital of the province of Aceh with a fairly large number of MSME traders and the ever-increasing spread of the Covid-19 virus in Aceh, is an important thing for the government to pay attention to regarding the sustainability of MSMEs in order to survive in the midst of the Covid-19 pandemic. The purpose of this study was to find out what strategies and steps were taken in empowering MSMEs by the Cooperatives, SMEs and Trade Office in Banda Aceh City during the COVID-19 pandemic. This study uses a qualitative descriptive approach. The sampling technique was carried out by Convenience Sampling, the data collection technique used the interview, observation, and documentation methods. data analysis using interactive statistical models. The results showed that the strategies carried out by the Banda Aceh City Cooperatives and Commerce Department in minimizing the impact of the Covid-19 pandemic included: 1) Conducting trainings for business actors, 2) providing technical guidance and training on online product marketing such as e-commerce applications. 3) Business capital assistance either comes from the Central Government in the amount of Rp. 2,400,000, - as well as from the Banda Aceh City Government of Rp. 1,000,000,-. 4) providing assistance for work tools and retrieving business tools for business actors in Banda Aceh City.

1. PENDAHULUAN

Pengembangan ekonomi kerakyatan diprioritaskan terhadap sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang berperan penting dalam menopang ekonomi nasional. Pemerintah berusaha mendorong UMKM untuk terus tumbuh sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja. UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan dan harus diakui bahwa UMKM mempunyai suatu peran yang sangat vital didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinegara sedang berkembang tapi juga di negara maju. Namun ditengah usaha pemerintah dalam memajukan UMKM, dunia sedang dihadapkan pada masalah kesehatan yang serius yaitu pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh belahan dunia. kemajuan UMKM akan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terlibat di dalamnya, sehingga jumlah penduduk miskin akan menurun (Indika, 2019). UMKM sangat berperan penting dalam perekonomian di Indonesia bahkan dalam kondisi krisis pun pemerintah harus memprioritaskan keberlangsungan UMKM. Bahtiar dan Saragih (2020) menyatakan dalam situasi krisis Covid-19 seperti ini, sektor UMKM

sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah karena merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB dan dapat menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, mensubstitusi produksi barang konsumsi atau setengah jadi.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu penopang perekonomian suatu negara maupun daerah. Berdasarkan observasi awal peneliti, pandemi Covid-19 memiliki dampak besar terhadap keberlangsungan bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan hasil Survei, dari Soetjipto (2020) sebanyak 96% pelaku usaha mengaku sudah mengalami dampak negatif Covid-19 terhadap proses bisnisnya (dari 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku usaha mikro kecil menengah). Ada beberapa kategori dampak yang dialami seperti terlihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Dampak yang ditimbulkan akibat Covid-19 (Soetjipto, 2020).

Sementara itu, tren Kasus Covid-19 di Aceh terus mengalami peningkatan, khususnya Ibukota Banda Aceh. Berdasarkan Satgas Covid-19 Pemerintah Aceh menyatakan kasus positif harian selalu berfluktuatif tapi data mingguan tren nya selalu meningkat. Jumlah kasus suspek di seluruh Aceh hari ini telah mencapai 6.102 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.134 orang sudah selesai masa isolasi, 882 orang dalam proses isolasi di rumah, dan 86 orang isolasi di rumah sakit (Dinas Kesehatan Aceh, 2021). Dengan meningkatnya kasus Covid-19, pemerintah mengambil kebijakan untuk pembatasan kegiatan masyarakat yang berdampak terhadap kegiatan perekonomian.

Menurut Agustriyana, dkk (2020) terdapat 3 tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM selama pandemi Covid-19 mewabah di tanah air. Pertama adalah dari segi pasokan, UMKM mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat distribusi logistik juga ikut terganggu. Tantangan Kedua adalah masalah *cashflow*. Yaitu omset pendapatan menurun akibat pemberlakuan *physical distancing*, selain itu UMKM juga kesulitan mendapatkan pinjaman modal yang membuat *cashflow* UMKM menjadi terganggu. Tantangan ketiga yakni anjloknya permintaan. Ketidakpastian pasar membuat permintaan akan barang yang dijual oleh para UMKM menjadi berpengaruh. Apalagi semenjak ada pandemi membuat kebutuhan para konsumen berubah. Masyarakat saat ini lebih membutuhkan produk-produk kesehatan seperti hand sanitizer dan masker dibandingkan kebutuhan lainnya.

Kegiatan Perekonomian selama pandemi Covid-19 cenderung melemah, ditandai dengan berkurangnya daya beli masyarakat yang terimbas. Kota Banda Aceh merupakan ibu Kota Provinsi Aceh dengan jumlah pedagang UMKM yang cukup besar serta penyebaran virus Covid-19 yang kian meningkat di Aceh (CNN Indonesia), maka menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah mengenai keberlangsungan UMKM agar dapat bertahan ditengah pandemi Covid-19. Mengingat kegiatan perdagangan UMKM tersebut merupakan pilar yang menopang Pendapatan Asli Daerah Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi dan langkah apa yang ditempuh dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan di Kota Banda Aceh di masa pandemi Covid-19.

2. TINJAUAN PUSTAKA / PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Konsep Strategi

Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Menurut Kuncoro (2005) strategi adalah penentu sebuah kerangka kerja dari kegiatan bisnis perusahaan dan memberikan pedoman untuk mengordinasikan kegiatan, sehingga dapat disesuaikan oleh perusahaan dan mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah. Jenis organisasi seperti apa yang akan dijalankan dan lingkungan yang diinginkan oleh perusahaan sudah dikatakan dengan jelas dalam strategi (Nursabrina, dkk. 2021)

Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan. Perumusan strategi menurut Tripomo dan Tejo (2005) mengemukakan bahwa tahapan manajemen strategik diawali dengan perumusan strategi. Perumusan strategi adalah proses memilih Pola Tindakan Utama (strategi) untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Kenyataannya perumusan strategi dapat dimulai dari mana saja, bisa dimulai dari kondisi lingkungan internal (*Strength, Weakness*) dan kondisi lingkungan eksternal (*Opportunity, Threat*) atau bahkan strategi itu sendiri. Namun yang terpenting pilihan strategi akhirnya harus saling sesuai dengan Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman yang ada dan tujuan (*visi-misi-goal*) yang ingin dicapai.

Dimasa pandemi Covid-19, agar UMKM dapat bertahan Sstrategi bisnis yang tepat untuk memasarkan produk di masa adalah melalui media elektronik dimana antara produsen dan konsumen tidak bertemu langsung pada satu tempat tetapi memiliki jangkauan pemasaran yang sangat luas (Ulya, 2020; Riyadi, Mahkota, & Suyadi, 2014; Kaplan, 2012). Dengan demikian, tidak terjadi kerumunan dan bisa menjaga jarak antar konsumen yang ingin bertransaksi.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih.

Krisnawati, (2018) menyatakan perkembangan UMKM dibedakan menjadi empat kategori yaitu :
 1. *Livelihood Activities*, yaitu usaha yang merupakan sektor informal, lebih mengedepankan kepentingan nafkah pribadi.
 2. *Micro Enterprise*, yaitu usaha yang lebih mengedepankan sifat pengrajin namun belum memiliki jiwa kewirausahaan.
 3. *Small Dynamic Enterprise*, yaitu usaha yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
 4. *Fast Moving Enterprise*, yaitu usaha yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan sedang dalam proses transformasi ke usaha besar.

Pandemi Covid-19

Definisi COVID-19 dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yakni: (1) kasus terduga atau suspect case, (2) kasus probable atau probable case, dan (3) kasus terkonfirmasi atau pasien yang sudah terbukti positif melalui tes laboratorium. Sementara di Indonesia definisi klasifikasi kasus COVID-19 ini dibedakan menjadi: (1) pasien dalam pengawasan atau PdP, (2) orang dalam pemantauan atau OdP, dan (3) orang tanpa gejala atau OTG (Kemenkes RI, 2020). Tingkat penyebaran COVID-19 atau virus corona ini tergolong sangat mudah. Salah satu penelitian menyebutkan bahwa dari 1 pasien positif bisa menularkan 3 orang di sekitarnya pada masa inkubasi (Salazar, 2020)

Para ilmuwan mengatakan bahwa negara ini sedang berlomba dengan waktu untuk menekan penyebaran Covid-19 sebelum Lebaran dan karantina komunitas bisa menjadi solusi satu-satunya untuk melakukan itu. Pemerintah memberikan instruksi langsung pada 16 Maret 2020, melalui Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kebijakan karantina wilayah adalah otoritas pemerintah pusat, dan mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak menerapkan karantina wilayah tanpa izin pemerintah pusat (Pransuamitra dan Agus, P. 2020).

Dampak ekonomi harga masker medis di Indonesia melonjak lebih dari enam kali lipat, dengan harga eceran yang awalnya sekitar Rp. 30.000 menjadi Rp. 185.000 (beberapa sumber menyatakan lebih dari Rp. 800.000 per kotak di beberapa toko setelah dua warga yang dinyatakan positif

mengidap coronavirus. Pembelian karena panik juga dilaporkan sejak pertengahan Februari sebelum kasus pertama dikonfirmasi. Masker dan penyanitasi tangan sulit didapatkan peredarannya di masyarakat dalam beberapa jam setelah pemerintah mengumumkan adanya kasus Covid-19 di Indonesia (Acehnews.com 2021). Di sektor UMKM, dampak penurunan pendapatan terbesar bakal terjadi di Kalimantan Utara sebesar 36% dengan kemampuan daya tahan hingga Agustus-Oktober 2020. Sementara itu, bagi pengemudi supir angkutan umum dan ojek, penurunan pendapatan terbesar bakal terjadi di Sumatra Utara sebesar 44%. Bagi petani dan nelayan, penurunan pendapatan terbesar bakal terjadi di Kalimantan Barat sebesar 34% dengan kemampuan daya tahan sampai Oktober-November 2020.

Dampak akibat Covid-19 terjadi pada berbagai lini kehidupan. Dampak-dampak ini pun berputar di beberapa sektor kehidupan masyarakat. Baik di sektor ekonomi, politik, hingga sosial budaya (Yanuarta dan Haryati, 2020). Sektor sosial budaya ditandai dengan adanya perubahan sosial budaya bagi masyarakat khususnya di Kota Banda Aceh. Perilaku sosial masyarakat Kota Banda Aceh juga berubah, misalnya saja yang selalu bersama-sama dalam menjalankan sebuah kegiatan, nilai budaya masyarakat yang mulai luntur karena kurangnya interaksi dan sosialisasi masyarakat akibat pemberlakuan *social/physical distancing*, hingga kondisi sosial masyarakat yang hampir terpuruk akibat dampak PHK. Kota Banda Aceh yang terkenal dengan sejuta warkop sebagai tempat berbagi informasi, makan, dan pertemuan lainnya harus dikurangi karena pembatasan sosial, hingga penurunan pendapatan pemilik warkop.

Konsep Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM merupakan serangkaian usaha untuk menolong peluang usaha perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil menurut undang-undang agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumberdaya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya (Fahrudin, 2012). Ada beberapa kriteria pemberdayaan UMKM menurut Nixon et.all dalam Karinayah (2018) yaitu : 1) Akses pemodal adalah mempermudah mendapat akses peminjaman modal usaha seperti kredit usaha rakyat (KUR) dan bantuan pemodal lainnya. 2) Pelatihan UMKM adalah memberi layanan untuk masyarakat sebagai wadah tempat memajukan UMKM. 3) Akses pasar adalah memberi kemudahan dalam memasarkan produknya. 4) Peningkatan kualitas produk adalah UMKM perlu meningkatkan efisiensi operasional, kualitas produk dan meningkatkan sumber daya manusia.

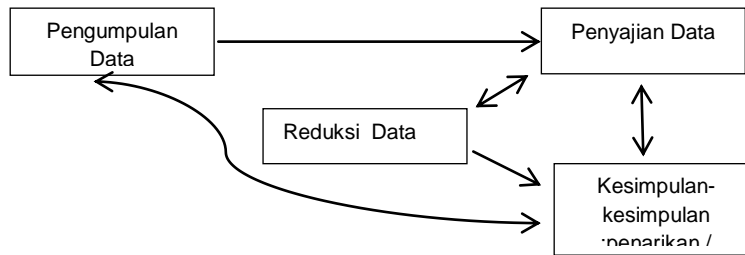
Menurut Rifai'i (2013) Secara konseptual pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan sistem pemberdayaan pelaku UMKM itu sendiri. Keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada partisipasi UMKM dan kebijakan stakeholder. Strategi pemberdayaan tidak hanya pemodal saja melainkan harus berorientasi secara keseluruhan atas kebutuhan UMKM baik secara individu maupun kelompok termasuk mendasarkan potensi sumber daya manusia.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat Deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh sebagai lembaga instansi pemerintah yang menangani pemberdayaan masyarakat yang salah satunya di sektor perdagangan dan pelaku UMKM kota Banda Aceh. Waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Oktober Tahun 2021. Populasi dalam penelitian adalah instansi yang mempunyai wewenang dan hubungan dengan masalah yang akan diteliti dan semua pelaku UMKM Kota Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara Convenience Sampling, yaitu responden yang dipilih mudah untuk dihubungi sehingga memudahkan untuk mengukurnya sebagai bagian dari unit sampel, yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Kepala Bagian Koperasi di Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Kepala Bagian Program Pemberdayaan UMKM dan beberapa masyarakat pelaku UMKM. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a) interview (wawancara mendalam) b) Observasi dengan terjun ke lapangan untuk menggali informasi penelitian, c) Dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari peneliti dari wawancara dan terjun langsung ke lapangan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, literature dan sumber-sumber tertulis yang diambil langsung dari objek penelitian (Maleong, 2005).

Teknik Analisa Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis model interaktif. Menurut Miles dan Huberman (2005), dalam analisa model interaktif ada tiga kelompok analisis, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.



Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif (Miles dan Huberman, 2005)

Tahap reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengobservasian, dan transformasi data mentah/data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan tersebut dengan cara induktif, yang mana peneliti berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, propinsi, atau definisi yang bersifat umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran UMKM di Kota Banda Aceh

UKM merupakan Usaha Kecil Menengah yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, bahkan mempunyai peran penting dan strategis dalam sektor perekonomian Kota Banda Aceh. Jumlah UMKM keseluruhan dari Provinsi Aceh 74.810, dari jumlah tersebut Kota Banda Aceh memiliki jumlah terbanyak UMKM pada Tahun 2021 dengan jumlah adalah 9.591 (diskopukmdag, 2021). Total penduduk Kota Banda Aceh berjumlah 254.904 jiwa (BPS, 2021), artinya sudah 4,10% penduduk Kota Banda Aceh telah menjadi pengusaha atau pelaku UMKM. Ada berbagai macam UMKM di Kota Banda Aceh diantaranya usaha warkop, usaha kelontong, usaha sembako, jualan pulsa, jualan hp, jualan pakaian jadi, usaha jasa servis kendaraan, tailor, konveksi, doosmeer, toko kue dan juga masih banyak usaha UMKM lainnya.

Pada Tahun 2019 terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi karena penerapan sistem *lockdown* atau pembatasan aktifitas masyarakat di setiap daerah. Hal ini menyebabkan terjadinya dampak bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Banda Aceh. Berdasarkan Media Antarnews menyebutkan sebanyak 6.173 pelaku UMKM yang berdampak Covid-19 di Kota Banda Aceh. Dengan demikian, sangat dibutuhkan langkah konkrit dan nyata untuk menyelamatkan UMKM dari dampak pandemi Covid-19.

Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Masa Pandemi Covid-19 dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh

Peneliti mendapatkan informasi dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh pada saat di wawancarai, mengenai strategi yang dilakukan untuk pemberdayaan usaha kecil menengah di masa pandemi Covid-19. Menanggapi lesunya perekonomian di Banda Aceh akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemerintah Kota Banda Aceh melakukan segenap upaya guna membantu pelaku usaha kecil dan menengah untuk bertahan menghadapi pandemi Covid-19. Hal ini sangat penting mengingat masyarakat sangat terpuruk dengan keadaan Covid-19 akibat pembatasan aktivitas sosial sehingga menurunnya pendapatan masyarakat yang berpengaruh terhadap daya beli. Berikut merupakan salah satu hasil wawancara peneliti mengenai strategi pemberdayaan UMKM dengan Pegawai Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh:

“strategi dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam membantu UMKM yang berdampak Covid-19 dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis berupa penjualan produk secara online seperti e-commerce dalam menghadapi masa pandemi Covid-19.”

Wawancara di atas dengan Bapak Muda Balia (Kabid Pengembangan Usaha Mikro) Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Menghadapi masa pandemi Covid-19 Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan memberikan strategi diantaranya adalah; Melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi pelaku usaha dalam lingkungan Kota Banda Aceh. Berbekal pengetahuan dan informasi yang didapatkan pada saat pelatihan, pelaku usaha dapat menerapkan dalam kegiatan mengelola usahanya. Selanjutnya, memberikan bimbingan teknis dan pelatihan pemasaran produk online seperti aplikasi *e-commerce*. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pelaku usaha mengingat kemajuan teknologi dan didukung keadaan pandemi Covid-19 masyarakat malas keluar rumah sehingga membeli kebutuhan melalui online. Bagi pelaku usaha mampu mengelola bisnisnya dengan cara online maka kegiatan usaha tetap jalan walaupun banyak aturan pembatasan aktifitas masyarakat dari pemerintah demi mencegah penularan Covid-19. Pemberian pelatihan *e-commerce* sangat bagus jika dibarengi dengan pengawasan mutu produk yang dihasilkan oleh UMKM. Menurut Amelia, dkk (2017) Konsep e-UMKM merupakan terobosan baru untuk memasarkan produk UMKM dalam menembus pasar bebas ASEAN. e-UMKM yang berbasis aplikasi *android* yang secara umum hampir sama dengan sistem jual beli *online*. Bedanya e-UMKM ini dikontrol dan diawasi oleh pemerintah. Selain itu, produsen UMKM yang memasarkan produknya dalam e-UMKM harus memiliki sertifikat penjamin mutu produk yang dikeluarkan dan disahkan oleh pemerintah. Produsen UMKM yang ikut memasarkan produknya juga harus memiliki *username* dan *password* yang diberikan oleh pemerintah setelah dinyatakan lolos sertifikasi kelayakan produk. Pelatihan yang diadakan juga tidak bersifat terus-menerus dan tidak adanya evaluasi dari adanya pelatihan yang telah dilakukan. Evaluasi dan pengendalian itu sangat penting untuk melihat bagaimana keberhasilan dari strategi pemberdayaan bagi UMKM Kota Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan Ibu Rita Sepsiana (Seksi Fasilitas Pemberdayaan Usaha Koperasi) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh sebagai berikut:

“Dalam mengatasi pandemi Covid-19 pemerintah pusat memberikan bantuan modal usaha untuk UMKM sebesar Rp. 2,400,000,- dilanjutkan kebijakan Pemko Banda Aceh melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, sebesar Rp. 1,000,000,-. Bantuan dana tersebut, sebagai salah satu upaya pemerintah agar UMKM tetap berjalan.”

Bantuan modal usaha baik bersumber dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 2.400,000,-, sebagaimana yang disampaikan Kadis Koperasi UKM dan perdagangan Kota Banda Aceh Bapak M. Nurdin, S.Sos, Senin (28/06/2021) sebanyak 2.110 calon penerima bantuan presiden (Banpres) BPUM tahun 2021 dari Kota Banda Aceh yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI. Selain Banpres, Pemerintah Kota Banda Aceh juga turut memberikan bantuan untuk para pelaku usaha kecil menengah di Kota Banda Aceh sebesar Rp. 1,000,000,-. Bantuan ini merupakan upaya pemerintah untuk mendukung para pelaku usaha kecil menengah agar di masa pandemi Covid-19 dapat mengembangkan usahanya. Upaya pemerintah pusat dalam pemberian bantuan usaha telah disalurkan dengan baik oleh Pemerintah Daerah dengan menyeleksi UMKM yang berhak menerima bantuan dana darurat selama pandemi Covid-19. Islami, dkk (2021) menyatakan untuk membantu UMKM dari pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan lima skema yaitu: 1) Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu Prakerja, 2) insentif perpajakan, 3) relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM, 4) stimulus bantuan modal kerja darurat, 5) menjadikan K/L/BUMN dan pemda sebagai penyangga ekosistem UMKM.

Dilanjutkan wawancara dengan Ibu Siti Nurhayati (Seksi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan) menerangkan yang bahwa:

“Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan memberikan bantuan alat kerja dan penguatan alat usaha bagi 196 pelaku usaha di Kota Banda Aceh berdampak Covid-19, Pak Wali Kota sangat serius memperhatikan pelaku usaha seperti home made dan lainnya.”

Dari wawancara di atas, dapat kita uraikan yang bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh sangat mendukung dan membantu para pelaku usaha seperti home made dimasa pandemi ini agar terus bertahan dan lancar usahanya. Sehubungan hal ini Aminullah Usman (Wali Kota Banda Aceh) membagikan 196 orang penerima peralatan usaha, 56 orang penerima mesin jahit dan gunting, 40 orang penerima peralatan catering sedangkan paket peralatan usaha kue untuk 100 orang penerima. Alat kerja dan penguatan sarana kerja ini dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dalam mengembangkan kegiatan usaha supaya tetap mampu bertahan saat ekonomi masyarakat anjlok akibat pandemi Covid-19. Dengan bantuan peralatan usaha diharapkan juga akan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh UMKM. Kualitas produk UMKM yang baik adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meraih kemenangan dalam persaingan pasar. Kualitas produk akan menciptakan keunggulan bersaing bagi pelaku usaha. Kualitas produk yang unggul akan berdampak langsung pada kinerja usaha, ada hubungan erat antara kualitas dengan nilai jual, juga berhubungan dengan keunggulan bersaing usaha (Dahmiri, dkk. 2021). Berikut beberapa dokumentasi wawancara dengan beberapa responden baik dari dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh maupun dengan pelaku UMKM.



Gambar 3. Wawancara dengan responden (Sumber: penulis)

Wawancara dengan pelaku usaha kecil menengah Bapak Dedi Setiawan (Warkop Mayor kopi) di Lamdingin Kota Banda Aceh adalah seabgai berikut:

“Masa pandemi Covid-19 ini sangat berdampak terhadap usaha yang kami jalankan dikarenakan ada pembatasan waktu buka dan tutup usaha dari Pemerintah Kota Banda Aceh, sehingga pendapatan hasil penjualan menurun omset kami”

Dari wawancara tersebut, dapat dijelaskan yang mana usaha kecil menengah seperti Warung Kopi pada saat pandemi Covid-19 di Kota Banda Aceh sangat dirasakan dampaknya, mengingat usaha warung kopi tersebut, memharapkan pengunjung duduk sambil berdiskusi ataupun ngobrol mereka menikmati minuman dan makanan yang kami sediakan. Keramaian di warung kopi tidak perbolehkan oleh pemerintah demi memutuskan rantai penyebaran virus Covid-19 di wilayah Kota Banda Aceh.

Pemilik Warung Kopi Dek Mi Rukoh menambahkan, terkait keadaan usahanya di masa pandemi ini ialah:

“Usaha warkop harus tiutup lebih awal, Keramain tidak bolehkan, harus jaga jarak, pengunjung kami batasi. Kami harus mengikuti peraturan yang berlaku agar izin usaha tidak dicabut. Omset kami sangat menurun hingga 40% dari sebelum masa pandemi.”

Dari Wawancara ini, Pelaku usaha kecil dan menengah seperti warung kopi benar-benar merasa kesulitan menjalankan usaha di tengah mewabahnya Covid-19 di Kota Banda Aceh. Pemerintah menerapkan peraturan jam malam, pembatasan aktifitas masyarakat, melarang keramaian dan selalu jaga jarak. Hal ini jelas berdampak bagi usaha warung kopi karena mengharapkan pengunjung yang ramai agar minuman dan makanan laku banyak di tempatnya. Keadaan berdinding terbalik tersebut, maka omset penjualan menurun hingga 40% dibandingkan dengan hari-hari sebelum terjadi pandemi Covid-19.

Selanjutnya, wawancara dengan Ibu Husyu Sufraini pemilik usaha kuliner mochicha yang beralamat Neusu Aceh, Kota Banda Aceh sebagai berikut:

“Pandemi Covid-19 bagi kami tidak ada hambatan dalam mengelola usaha karena sistim penjualan kami online dan pemerintah telah memberikan pelatihan sebagai strategi bagi kami dalam menjalankan usaha disaat pandemi melanda”.

Informasi di atas, menjelaskan bahwa kondisi pandemi Covid-19 tidak berdampak signifikan bagi usaha kuliner mochicha, Begitu juga dalam menjalankan usahanya tidak terdapat hambatan yang berarti karena sistim penjualan mochicha adalah dengan cara online. Pendapatan dari penjualan mochicha selama pandemi masih stabil. Pemerintah memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pelaku usaha di Kota Banda Aceh untuk memperoleh strategi menjalankan usaha dalam menghadapi masa pandemi yang sedang terjadi.

Kemudian wawancara dengan pemilik usaha Rafi Steel, Bapak Darma Muslim di Kawasan Kota Banda Aceh mengatakan bahwa:

“Terjadi penurunan omset penjualan karena menurunnya pesanan order dibengkel kami, orderan kanopi, pagar, teralis dan jenis las lainnya. Namun, pemerintah memberi alat kerja seperti travo las, gerinda tangan, gerinda duduk dan bor tangan untuk kelancaran kegiatan dan bantuan alat kerja”

Keterangan dari Bapak Darma Muslim di atas, Selama pandemi Covid-19 orderan sangat menurun tidak seperti sebelumnya ini dapat disebatkan factor ekonomi masyarakat rendah di Kota Banda Aceh, ruang gerak dalam melakukan usaha dan aktifitas sangat terbatas dengan dibelakukan pembatasan pada masyarakat. Mengatasi perkembangan usaha di masa pandemi ini pemerintah memberikan bantuan alat kerja seperti seperti: travo las, gerinda tangan, gerinda duduk dan bor tangan. Alat ini memang sangat berguna untuk kelancaran dan kelangsungan usaha kami, apalagi masa pandemi ini kami sangat mengharapkan bantuan alat kerja dan sarana kerja. Pemberian bantuan alat usaha juga akan memberikan dampak terhadap kualitas produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Pemberian bantuan usaha berupa sarana dan prasarana dalam proses produksi seperti mesin dan alat produksi lainnya, strategi ini dibentuk berlandaskan pada Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM (Umairi, dkk. 2021).

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan :

1. Sebanyak 4,10% dari total 254,904 orang jumlah penduduk kota banda Aceh merupakan pelaku UMKM dengan berbagai jenis usaha yang dilakukan.
2. Strategi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan di Kota Banda Aceh dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat selama pandemi Covid-19 diantaranya adalah : Melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi pelaku usaha, memberikan bimbingan teknis dan pelatihan pemasaran produk online seperti aplikasi e-commerce. Pemberian Bantuan modal usaha baik bersumber dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 2.400,000,- maupun dari Pemerintah Kota Banda Aceh sebesar Rp. 1,000,000,-. Serta pemberian bantuan alat kerja dan penguatan alat usaha bagi pelaku usaha.
3. Omset penjualan UMKM dari beberapa pelaku usaha di Kota Banda Aceh menyatakan penurunan omset penjualan diakibatkan oleh pembatasan jam malam dan keadaan lockdown dikarenakan zona merah selama pandemi Covid-19.

Saran

Adapun saran-saran dari peneliti antara lain:

1. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh agar terus meningkatkan strategi dalam pengembangan dan bantuan terhadap UKM yang berdampak akibat pandemi Covid-19 agar UKM semakin berkembang dan maju serta dapat menopang perekonomian nasional.
2. Pelaku UKM untuk terus berbenah mengikuti perkembangan era digitalisasi dalam memasarkan produk yang dihasilkan.
3. Penelitian yang akan datang agar dapat menyempurnakan penelitian yang telah dilakukan.

REFERENSI

- AcehNews.com. (2021). Serah terima alat usaha untuk pelaku UMKM. Kode Akses : <https://www.newsbandaaceh.com/2021/01/wali-kota-kembali-serahkan-alat-usaha-untuk-pelaku-umkm>. (Diakses Tanggal 28 Juli 2021)
- Agustriana, D., Ramadhan, N dan Oktavien, S. (2020). Bertahan Usaha Pada Umkm Di Tengah Pandemic Covid-19. Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Mengabdikan Untuk Negeri. Manuskrip: Sept-2020; Ditinjau: Okt-2020; Diterima: Okt-2020; Online: Jan-2021; Diterbitkan: Jan-2021.
- Amelia, M.N, Prasetyo, Y. E., dan Maharani, I. (2017). E-UMKM Aplikasi Pemasaran produk UMKM berbasis Android sebagai strategi meningkatkan perekonomian. Prosiding SNATIF Ke. 4 tahun 2017. ISBN: 978-602-1180-50-1.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2021). Jumlah rerata penduduk Aceh. kode akses : <https://aceh.bps.go.id/indicator/12/55/1/jumlah-penduduk.html> (diakses tanggal 20 Agustus 2021)
- Bahtiar, R.A dan Saragih, J.P. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap perlambatan Ekonomi Sektor UMKM. Info SingkatBidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol. XII, No. 6/II/Puslit/Maret/2020. Jakarta. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Dahmiri, Wulan, S.K. dan Khalik, I. (2021). Pengaruh Kualitas Produk dan Inovasi Terhadap Keunggulan Bersaing UMKM Kuliner di Masa Pandemi Covid-19. Journal of Economics and Business, 5(2), September 2021, 434-438.
- Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. (2021). Tren kasus Covid-19 di Aceh. Kode Akses : <https://dinkes.acehprov.go.id/news/read/2021/01/07/532/tren-kasus-covid-19-meningkat-di-aceh-perketat-protokol-kesehatan.html> (diakses tanggal 02 Juli 2021)
- Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan. (2020). Kode Akses <http://diskopukmdag.bandacehkota.go.id/2021/06/30/sebanyak-2-110-calon-penerima-banpres-bpum-tahun-2021-di-banda-aceh-telah-diusulkan> (diakses tanggal 21 Agustus 2020).
- Islami, N.W., Supanto, F. Dan Soeroyo, A. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan UMKM yang terdampak Covid-19. Jurnal Arta Raharja 2 (1) (2021) Hal. 45-57. <http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr>
- Kaplan, A. (2012). Invited Comment On The Theme Of the Special Issue Social Media: Back to the Roots and Back to the Future. Journal of Systems and Information Technology, 14(2), 101-1-4
- Karinayah, D. (2018). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Fis. An 6118 sup.pdf
- Krisnawati, D. (2018). Peran Perkembangan Teknologi Digital Pada Strategi Pemasaran Dan Jalur Distribusi Umkm Di Indonesia. Jurnal Managemen Bisnis ISSN: 2338 – 4794 Vol.6. No. 1 Januari 2018.
- Kuncoro, M. (2005). Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif. Erlangga.
- Mahkota A. P, R. Dan Suyadi, I. (2014). Pengaruh Kepercayaan dan Kenyamanan Terhadap Keputusan Pembelian. Jurnal Administrasi Bisnis, 8(2), 1-7.
- Maleong., (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Rasda Karya.
- Miles dan Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nursabrina, H., Fitri Ayu, D dan Rahmawati. (2021). Strategi Bertahan Umkm Paguyuban Sewelas Penjanginsari Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 8 Nomor 2, Bulan Agustus Tahun 2021
- Pransuamitra, Putu Agus (2020). Penutupan Pasar: Rupiah Melemah ke Rp13.870/US\$". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 25 September 2020.
- Rifai'i, B (2013). Efektivitas Pemberdayaan UMKM Kerupuk Ikan Dalam Program Pengembangan

- Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Jobon Kabupaten Sidoarjo. Jurnal kebijakan dan manajemen publik Vol. 1 no.1 tahun 2013.
- Rosmadi, Maskarto L C. (2021). Penerapan Strategi Bisnis di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol 4 No 1 Bulan Maret 2021.
- Salazar, PM. (2020). Using predicted imports of 2019-nCoV cases to determine location that may not be indentifying all imported cases. Available on <https://doi.org/10.1101/2020.02.04.20020495>
- Soetjipto, N. 2020. Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi Covid-19. Yogyakarta: K-Media.
- Tripomo, T dan Udan. (2005). Manajemen Strategi. Bandung: Rekayasa Sains.
- Ulya, H. N. (2020). Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa Timur Pada Kawasan Agropolitan. el Barka: Journal of Islamic Economic and Business, 3(1), 80- 109.
- Umairi, A., Kencana, N dan Amaliatulwalidain. (2021). Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan UMKM Kota Palembang Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal pemerintahan dan politik volume 6 no. 3 oktober 2021. ISSN print : 2502-0900. ISSN online : 2502-2032
- UMKM dan Produk UKM Aceh. (2021) [UMKM.Acehprov.go.id](https://dataumkm.acehprov.go.id). kode akses : . <https://dataumkm.acehprov.go.id/index.php/umkm>. (diakses Tanggal 19 Juli 2021)
- UU No 20 tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Yanuarita, H dan Haryati, S. (2020). Pengaruh Covid-19 terhadap kondisi sosial budaya di kota malang dan konsep strategis dalam penanganannya. Jurnal ilmiah widya sosiopolitika E-ISSN 2685-457 58